

MODERNISASI BANYUMAS 1890-1942: KAJIAN PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI

Oleh:
Esa Meiana Palupi
(12407141027)

Abstract

Modernization Nederlandsch-Indie period occurred in the late 19th century and early 20th century embodied in the development of various fields. Modernization is the economic development that has a wide range, which includes changes in techniques, including economic and ecological which took place in the overall social networks and cultural. This process goes hand in hand with colonialism launched by the Nederlandsch-Indie government through the bureaucracy, administration, industrialization, and western education. This study reveals the general condition of Banyumas entered the reign of the Nederlandsch-Indie and the process of modernization and its influences through the study of social and economic development. Modernization in Banyumas influenced by Agrarian Law and Ethical Policy. The process that takes place in this 1890-1942 period, marked by the expansion of plantations and the rise of the industrial sector coupled with infrastructure development. This process is related to the construction of the colonial city, the construction of roads and transport, irrigation, and electricity and education. Modernization in Banyumas affect the social life with the advent of modern elites are accompanied by social movements and lifestyle changes. Modernization also raises new economic centre related to the progress and setbacks in the area of Banyumas.

Key Words: Modernization, Banyumas, Socio Economic

A. Pendahuluan

Sebelum masa kolonial, perkembangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan alam atau faktor geografis. Pulau Jawa memiliki sederetan gunung berapi yang membentang sepanjang pulau dari timur ke barat. Gunung-gunung dan dataran tinggi mendukung wilayah pedalaman menjadi kawasan yang sangat cocok bagi pengolahan pertanian.¹ Sungai menjadi jalur penghubungan utama di wilayah ini. Sehingga, lembah sungai menjadi pusat-pusat kegiatan manusia. Sama halnya dengan daerah Lembah Sungai Serayu yang menjadi pusat kegiatan manusia sejak masa pra kolonial.

Lembah Sungai Serayu merupakan suatu daratan luas yang terletak di antara kawasan Pegunungan Sumbing dengan puncak di Gunung Slamet yang memiliki tinggi mencapai 3.428 meter diatas permukaan laut. Kawasan pegunungan ini memanjang ke arah selatan membentuk batas wilayah dengan daerah Bagelen. Kawasan ini dialiri oleh Sungai Serayu sehingga dinamakan Lembah Sungai

Serayu atau lebih dikenal dengan nama Banyumas.

Banyumas merupakan wilayah subur di daerah Pegunungan Serayu yang membentang dari bagian utara hingga selatan. Wilayah ini disebut sebagai Lembah Serayu karena daerah intinya berada diantara pegunungan yang dilalui oleh Sungai Serayu beserta anak-anak sungainya. Letak geografis yang strategis membuat wilayah Banyumas sangat cocok untuk kawasan pertanian. Bahkan wilayah ini dijadikan sebagai wilayah lumbung padi bagi kerajaan Mataram.

Pada abad ke-19, penguasaan Belanda atas Hindia Belanda membawa banyak perubahan di berbagai bidang. Perubahan drastis terjadi ketika memasuki masa ekonomi liberal pasca Tanam Paksa. Berakhirnya sistem Tanam Paksa, ditandai dengan penerapan Politik Liberal di Hindia Belanda yang dimulai sejak 9 April 1870 melalui Undang-undang Agraria. Politik ekonomi liberal atau sering disebut dengan “politik pintu terbuka” dilakukan karena perubahan iklim politik di negara Belanda.² Melalui

¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 22.

² Fasseur, C., *The Politics of Colonial Exploitation: Java, Dutch, and Cultivation System*, (Leiden, 1975), hlm. 26.

ekonomi liberal, pemerintah membuka Hindia Belanda bagi para pengusaha swasta asing untuk menanamkan modalnya dalam bidang perdagangan, transportasi, pertanian dan perkebunan. Selama zaman ini, pemerintah Hindia Belanda membangun banyak prasarana untuk menunjang produksi tanaman ekspor.

Undang-undang Agraria 1870 telah mendorong dilangsungkannya industrialisasi pertanian yang turut serta menuntut pembangunan infrastruktur yang lebih memadai seperti jalan raya, jalan kereta api, irigasi, pelabuhan, dan telekomunikasi. Baik swasta maupun pemerintah memberikan investasi dalam bidang pembangunan infrastruktur tersebut. Tindak lanjut yang menyusul modernisasi teknologi itu, berupa inovasi dalam sektor birokrasi, administrasi, dan edukasi, kesemuanya mengacu kepada struktur organisasi modern bersamaan dengan penciptaan tenaga kerja profesional.³

Pada awal abad ke-20, muncul gagasan baru yang disebut dengan Politik Etis. Politik Etis ditetapkan

³ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, (Jakarta: Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1992), hlm. 181.

sebagai suatu bentuk balas budi pemerintah Belanda kepada masyarakat Hindia Belanda. Politik Etis diterapkan secara intensif dalam tiga bidang, yakni pendidikan, pembangunan jaringan irigasi, serta pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa. Meskipun pada kenyataannya, Politik Etis tidak mampu memberikan kesejahteraan sepenuhnya kepada rakyat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pembangunan masyarakat di Hindia Belanda.⁴

Sebagai wilayah pemerintahan Hindia Belanda, Banyumas dijadikan sebagai wilayah karesidenan yang luas. Pembangunan daerah semakin ditingkatkan setelah memasuki masa Politik Etis dan desentralisasi. Pada 1903, secara resmi ditetapkan Undang-undang Desentralisasi. Undang-undang ini telah membuka peluang bagi Dewan Daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing secara otonom, tak terkecuali Banyumas yang ditetapkan sebagai daerah otonom pada 1907, dan

⁴ Soegijanto Padmo, *Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia: Bunga Rampai*, (Yogyakarta: Aditya Media bekerja sama dengan jurusan sejarah FIB UGM, 2004), hlm. 51.

tertuang dalam *Staatsblad* No. 146 Tahun 1907.

B. Geografi Banyumas

Banyumas merupakan nama sebuah karesidenan dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah bagian barat daya. Sebagai wilayah karesidenan, Banyumas merupakan daerah pedalaman yang terisolasi karena dilalui dua jalur pegunungan, yakni Pegunungan Serayu bagian utara dan Pegunungan Serayu bagian selatan. Pegunungan Serayu bagian utara merupakan sambungan dari Pegunungan Dieng di sebelah timur laut yang membujur ke arah barat. Perbatasan antara Pegunungan Serayu dengan Pegunungan Dieng adalah kawasan hutan lebat dengan bukit terjal yang terletak di sebelah timur Banyumas. Pegunungan Serayu ini semakin ke barat semakin rendah sehingga membentuk dataran rendah yang luas dan terus membentang hingga ke Sungai Citanduy sebagai batas geografis antara Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Di antara dua pegunungan itu terletak daerah inti Banyumas yang ditengah-tengahnya mengalir Sungai Serayu. Oleh sebab itu, wilayah Banyumas juga dikenal dengan sebutan

Lembah Serayu. Kondisi tanahnya terdiri dari lapisan vulkanis muda yang subur dan dilalui oleh Sungai Serayu beserta anak-anak sungainya.⁵ Dengan demikian, Banyumas telah dipandang penting dari segi ekonomi, karena memiliki daerah persawahan yang subur dengan pengairan alami yang memadai.

Bagian utara dan timur laut Karesidenan Banyumas sebagian besar merupakan perbukitan. Garis batas utara melalui puncak Gunung Prahu dan Gunung Slamet terbelah oleh aliran sungai yang bermuara di Laut Jawa dan Samudra Hindia. Dengan pegunungan sebagai pemisahannya maka lereng selatan merupakan bagian terbesar dari wilayah Karesidenan Banyumas. Daerah sebelah timur ke Sungai Serayu terus ke pegunungan Dayeuh Luhur dipisahkan oleh rawa-rawa luas dan jalan ke Nusakambangan.⁶

⁵ Tanto Sukardi, *Tanam Paksa di Banyumas: Kajian mengenai Sistem, Pelaksanaan dan Dampak Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 12.

⁶ Yustina Hastrini, dkk., *Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas masa Gandasubrata 1913-1942*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2015), hlm. 16.

Karesidenan Banyumas berbatasan dengan Tegal dan Pekalongan di sebelah utara, Bagelen di sebelah timur, Priangan dan Cirebon di sebelah barat, dan Samudra Hindia di sebelah selatannya. Karesidenan Banyumas terbagi menjadi beberapa kabupaten yakni Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, dan Banyumas. Disebelah barat berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Barat dengan Sungai Citanduy sebagai batas teritorial dengan wilayah Jawa Tengah. Sebelah selatan dibatasi oleh pantai Samudra Hindia, sebelah tenggara berbatasan dengan Bagelen (Kabupaten Kebumen), sebelah timur dengan Kabupaten Wonosobo, sedang sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.⁷

Kabupaten Banyumas terletak ditenggara Karesidenan Banyumas. Wilayah ini dibatasi oleh Kabupaten Purwokerto dan Cilacap di sebelah barat, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, sebelah utara berbatasan dengan

⁷ Budiono Herusatoto, *Banyumas: Sejarah, Budaya, Bahasa dan Watak*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008), hlm. 13.

Purbalingga, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Kabupaten Banyumas terdiri dari empat distrik, yakni Distrik Banyumas, Distrik Sokaraja, Distrik Kalireja (Adireja), dan Distrik Purwareja.

Pusat pemerintahan karesidenan dan kabupaten berada di Kota Banyumas, di Distrik Banyumas. Kota ini terletak di tepi Sungai Serayu. Sebagai pusat pemerintahan yang terletak di tepi sungai, Kota Banyumas menjadi lokasi yang ramai dan strategis. Lokasi ini membuat Kota Banyumas menjadi bandar terpenting perekonomian di lembah Sungai Serayu. Hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan di wilayah Karesidenan Banyumas dikirim melalui kota ini untuk kemudian dibawa menuju Pelabuhan Cilacap.

Sampai pada awal abad ke-19, Banyumas merupakan bagian dari Kasunanan Surakarta. Pasca Perang Jawa, Banyumas secara resmi menjadi milik pemerintah kolonial melalui perjanjian dengan pihak Kerajaan Surakarta.⁸ Hadirnya pemerintah kolonial di Banyumas, tidak serta merta

⁸ Soegeng Wiyono dan Sunardi, *Banjoemas: Riwayatmoe Doeloe*, (Purwokerto: Daya Mandiri Production, 2006), hlm. 5.

menghilangkan unsur tradisional yang ada. Sebaliknya, unsur-unsur tradisional dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk melegitimasi kedudukannya. Fungsi tradisional bupati tetap menempati posisi sentral bagi masyarakat bumiputra lengkap dengan simbol-simbol yang melekat pada jabatan itu.

Penduduk Banyumas sebagian besar adalah orang Jawa sedangkan penduduk Eropa dan Timur Asing tidak banyak jumlahnya kecuali penduduk China. Mereka umumnya tinggal di kota-kota kabupaten, ibukota karesidenan, dan kota pelabuhan. Kehidupan ekonomi di Banyumas pada masa awal pemerintahan Hindia Belanda diwarnai oleh Sistem Tanam Paksa. Sistem Tanam Paksa di Karesidenan Banyuas dilaksanakan dalam tiga kategori, yakni; penyerahan hasil penanaman wajib, pajak tanah (untuk tanah yang tidak ditanami tanaman wajib) dan berbagai pajak lain, serta penyerahan tenaga kerja.

C. Modernisasi di Banyumas

Periode 1870 merupakan masa peralihan dari sistem tanam paksa menjadi sistem ekonomi liberal. Tuntutan golongan liberal Belanda menghendaki eksploitasi tanah jajahan

oleh negara diakhiri dan digantikan oleh para pengusaha swasta. Peralihan pengelolaan perkebunan dari pemerintah ke pihak swasta di Banyumas berlangsung hingga tahun 1890, terutama pada perkebunan tebu. Ekonomi liberal yang berlangsung nampak pengaruhnya terhadap perluasan areal perkebunan tebu yang diikuti dengan pendirian pabrik-pabrik gula. Pada saat itu, perluasan areal perkebunan tebu mencapai dua kali lipat dari masa sebelumnya, yakni dari 500 bau pada 1885 menjadi 1.100 bau pada 1890. Seiring dengan bertambahnya luas lahan perkebunan tebu, maka jumlah pabrik gula juga bertambah.

Pada awalnya hanya terdapat satu pabrik gula di Karesidenan Banyumas, yakni Pabrik Gula Kalibagor di Kabupaten Banyumas. Perusahaan swasta yang bergerak pada sektor perkebunan tebu dan pabrik gula di Banyumas diantaranya Pabrik Gula Klampok dipimpin oleh Administratur J.T de Ruijter de Wildt, Pabrik Gula Purwokerto yang dipimpin oleh Administrateur M.C Brandes.⁹ Selain itu, pabrik gula swasta lainnya adalah Pabrik Gula Bojong yang dipimpin oleh

⁹ Tanto Sukardi, *op.cit.*, hlm. 68-69.

HCC Fraissenet, Pabrik Gula Kalimanah yang dipimpin oleh Ch. Conradi. Disusul kemudian pabrik gula di Majenang.

Perkembangan ekonomi pada tahun 1900 tidak hanya diwujudkan dalam perluasan areal perkebunan tebu saja, tetapi juga terwujud dalam pengelolaannya melalui teknik dan manajemen modern. Pada awal pendirian pabrik gula, digunakan teknologi tradisional dengan menggunakan tenaga manusia dan hewan, begitu juga dengan bentuk transportasi pengangkutan tebu dari perkebunan tebu ke pabrik gula hingga menuju ke Pelabuhan Cilacap masih menggunakan tenaga manusia dan hewan. Perubahan terjadi ketika mesin-mesin penggiling tebu mulai didatangkan dan teknologi trem mulai memasuki Banyumas. Dengan adanya trem, proses transportasi peralatan dan komoditas menjadi lebih cepat.¹⁰

Kegiatan perekonomian masyarakat di Banyumas tidak hanya terbatas pada sektor perkebunan. Sektor

¹⁰ Ageng Nur Ma'ruf, "Peranan Trem *Serajoedal Stroomtram Maatschappij* dalam Perkembangan Pengangkutan di Banyumas 1896-1899", (*Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY*, 2014), hlm. 57.

industri juga berkembang di daerah ini mulai tahun 1890. Kegiatan bidang produksi meningkat setelah para pengusaha membangun perekonomiannya sendiri. Berbagai industri seperti kerajinan batik, tenun, anyaman, peralatan pertanian, emas dan perak, perkakas, tembikar, produsen kapal, produsen kereta, dan lain-lain.¹¹ Industri-industri tersebut semakin berkembang hingga pada 1920, terdapat lebih dari 20 pabrik dan 300 perusahaan yang mempekerjakan hampir 3.000 orang penduduk bumiputra dan Timur Asing di Karesidenan Banyumas.¹²

Memasuki masa Politik Etis dan Desentralisasi, wilayah Banyumas mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam bidang ekonomi maupun infrastruktur yang diwujudkan dalam pembangunan kota kolonial, pembangunan dan perbaikan jaringan transportasi dan komunikasi, serta edukasi. Sebagai pusat pemerintahan kolonial, kota Banyumas dibangun dengan jaringan jalan berdasarkan pola grid yang tegas di Sudagaran. Kota ini di kembangkan dengan struktur kota

¹¹ "Bijlage C", *Kolonial Verslag 1892*, hlm. 1-4.

¹² "Bijlage GG", *Kolonial Verslag 1921*, hlm. 2.

ganda, yakni sebagai pusat pemerintah pribumi dan pusat pemerintahan kolonial yang ditunjukkan dengan adanya kediaman bupati dan residen.¹³ Berlakunya Undang-undang Desentralisasi menyebabkan pembangunan infrastruktur Kota Banyumas semakin meningkat. Secara fisik, infrastruktur yang ada di kota Banyumas pada awal abad ke-20 sudah cukup lengkap.

Pembangunan jalan dari Banyumas menuju Buntu pada 1843 hingga 1845 merupakan proyek besar pertama. Selanjutnya pada 1912 hingga 1925, mulai dilaksanakan pembangunan jalan ke Banjar (Karesidenan Priangan) lewat Wanareja, Majenang dan Wangon. Jalan itu membuka desa-desa yang dilaluinya. Jalan Purwokerto-Banyumas-Cilacap pada saat itu telah selesai. Ini merupakan jalan darat yang dilalui tanpa menggunakan penyeberangan Sungai Serayu.¹⁴ Pada

¹³ Ronald Gilbert Gill, *De Indische Stad op Java en Madura: en Morphologische Stadi van Haar Ontwikkeling*, (Den Haag: Publicatieburo Bouwkunde, Faculty der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, 199), hlm. 243-244.

¹⁴ M. Zandveld, "Memori Residen Banyumas, 4 Juli 1922", *Memori Serah Jabatan 1921-1930*

1925, wilayah Banyumas sudah memiliki tiga jalan utama yang menghubungkannya dengan daerah lain. Tiga jalan utama tersebut, diantaranya:¹⁵

- 1) Jalan di barat laut, melalui Banyumas-Purwokerto-Bumiayu-Prupuk-Tegal.
- 2) Jalan di timur sebelah utara, melalui Banyumas-Wonosobo melintas pas Kledung (1390 m) menuju Magelang-Yogyakarta.
- 3) Jalan di timur sebelah selatan, melalui Banyumas-Sumpiuh-Kebumen-Purworejo lewat tanjakan Mergoyoso terus ke Magelang dan Yogyakarta.

Perubahan drastis pada bidang transportasi terjadi ketika pemerintah mendirikan transportasi modern berupa kereta api. Pembangunan kereta api mulai terasa kebutuhannya dengan adanya perkembangan perkebunan, terutama di lembah-lembah sungai yang

(*Jawa Tengah*), (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977), hlm. XCV.

¹⁵ M.J van der Pauwert, "Memori Residen Banyumas, 24 Oktober 1925" *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977), hlm. XCVIII-XCIX.

subur di pedalaman Jawa. Kereta api negara di Banyumas dimulai dengan pekerjaan jaringan kereta api negara *Staatsspoorwegen* (SS) di Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta dengan Cilacap.¹⁶ Selanjutnya, dibangun jalur kereta api Bandung - Yogyakarta melalui Maos dan Kroya serta jalan kereta api Kroya - Cirebon melalui Purwokerto.

Pada bulan Mei 1895, dikerjakan pula jalur kereta api oleh perusahaan swasta, *Serajoedal Stroomtram Maatschappij* (SDS) di daratan Lembah Serayu. Pada awalnya, pembangunan jalur kereta api ini diniatkan untuk melewati Kota Banyumas sebagai Ibukota Karesidenan, namun rencana tersebut dibatalkan karena pertimbangan biaya yang besar mengingat Kota Banyumas dikelilingi oleh pegunungan. Sebagai alternatif, jalur tersebut dibuat melalui Kota Purwokerto.¹⁷ Kemudian SDS

¹⁶ Susanto Zuhdi, *Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*, (Jakarta: KPG, 2002), hlm. 43.

¹⁷ Prima Nurahmi Mulyasari, "Modernisasi Tata Ruang Kota Purwokerto 1900-1935", (*Patrawidya*, Vol. 15, No. 4, Desember 2014), hlm. 607.

membangun jalur Maos – Purwokerto, Purwokerto – Sokaraja, Sokaraja – Purworejo, Purworejo – Banjarnegara, dan Banjarsari – Purbalingga.¹⁸

Tidak hanya kereta api, perkembangan transportasi juga diwarnai dengan munculnya sepeda (*fiets*) dan kendaraan bermotor. Pada 1927, seluruh wilayah di Karesidenan Banyumas terdapat 499 kendaraan bermotor meliputi sepeda motor dan mobil pribadi.¹⁹ Dalam perkembangan selanjutnya kendaraan-kendaraan bermotor ini juga dijadikan kendaraan sewa untuk umum.

Salah satu kebijakan Politik Etis di Hindia Belanda adalah pembangunan irigasi. Perkembangan irigasi oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dimulai dengan membentuk *Irrigatie Afdeling Serayu* yang mengelola 180 saluran air di Karesidenan Bagelen dan 40 saluran air di Karesidenan

¹⁸ Prima Nurahmi Mulyasari, "dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Karesidenan: Purwokerto 1900-1942", (*Skripsi Jurusan Sejarah FIB UGM*, 2006), hlm. 36.

¹⁹ Purnawan Basundoro, "Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1840-1940", (*Tesis, Pascasarjana Prodi Sejarah FIB UGM*, 1999, hlm. 208-209.

Banyumas.²⁰ Pada 1884 sistem irigasi modern pertama yang dibangun dalam irigasi Singamerta. Pada 1906, dibangun saluran besar irigasi di Kabupaten Purwokerto. Pada 1912, dibangun kembali sistem irigasi yang lebih besar yang disebut Bandjar-Tjahjana, karena mengalir dari Kota Banjarnegara sampai ke Dsitrik Cahyana (Bukateja) di Purbalingga. Pada 1938, beberapa proyek besar di Banyumas selesai dikerjakan antara lain pembangkit listrik tenaga air di Desa Ketenger dan bendung Gambarsari di Rawalo

Listrik di Banyumas dikelola oleh anak perusahaan ANIEM, yaitu NV. *Electriciteits Maatschappij Banjoemas* (EMB) dengan perusahaan di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Sokaraja, Cilacap, Gombong, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Maos, Kroya, Sumpiuh, dan Banjarnegara. Perusahaan ini memiliki pembangkit sendiri di Ketenger. Pembangunannya meliputi pembangunan asupan air dari Sungai banjaran yang ditujukan untuk irigasi sebesar 30% dan 70% untuk pembangkit listrik dengan tegangan

²⁰ "Bijlagen C" *Kolonial Verslag van 1892*, hlm. 125.

sebesar 30 kV (kilo Volt) per-substasiun.²¹

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil bagi kepentingan perekonomian Hindia Belanda, pemerintah mulai mengenalkan pendidikan modern. Namun, pendidikan ini tidak hanya memproduksi jenis tenaga kerja yang diperlukan dalam kepentingan kolonial, tetapi juga menjadi alat utama bagi bumiputra untuk menuju modernitas. Pendidikan melahirkan satu unsur baru dalam masyarakat bumiputra, yaitu lapisan cendekiawan. Golongan ini pada umumnya berasal dari lingkungan priyayi, namun pada perkembangan selanjutnya golongan ini keluar dari kultur tradisionalnya. Mereka memperoleh sarana baru, gagasan baru, dan informasi baru.²²

²¹ Ir. G.S. Goemans, "Het waterkrachtwerk „Ketenger” der N.V. Algemeene Nederlandsch-Indie Electriciteit Maatschappij in de residentie Banjoemas (Java) door ir. G.S. Goemans", (*De Ingenieur In Nederlandsch-Indie*, 7e Jaargang Nummer 9, September 1940), hlm. II. 156.

²² Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, terj. Sunarto, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 114.

D. Pengaruh Modernisasi di Banyumas

Modernisasi memberikan dampak yang sangat besar, terutama bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Pada masyarakat modern telah terjadi pergeseran dalam strata sosial yang diwujudkan dalam proses diferensiasi, pembagian kerja yang rumit, munculnya berbagai bentuk organisasi baik formal maupun sukarela. Munculnya industri di Banyumas telah menyebabkan berkembangnya buruh upahan seiring dengan sistem ekonomi uang. Masyarakat dituntut untuk meningkatkan ketrampilan mereka diluar sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Diperkenalkannya sistem pendidikan modern semakin meluaskan pengaruh barat terhadap pandangan masyarakat bumiputra. Pendidikan menjadi kunci suatu kemajuan menuju modernitas yang terwujud dalam perubahan stratifikasi. Kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak lagi didasarkan pada keturunan, tetapi didasarkan pada standar kemampuan (prestasi individual) yang dikaitkan dengan ijazah yang diperoleh dari

pendidikan modern.²³ Melalui pendidikan, penduduk bumiputra mengalami perubahan cara berfikir, dari berfikir pralogis-tradisional menjadi logis-rasional. Golongan terpelajar ini semakin paham akan realitas sosial dan budaya masyarakat yang terjadi selama masa kolonial.

Munculnya golongan elit modern, khususnya golongan elit cendekiawan memunculkan kesadaran akan realitas sosial yang terjadi di Banyumas. Kemiskinan yang terjadi di Banyumas terutama pada tahun 1930-an telah mendorong golongan elit Banyumas bersama pangreh praja, termasuk kaum wanita, untuk melakukan beberapa upaya di antaranya mendirikan rumah miskin, dapur umum, pelatihan ketrampilan khusus, pekerjaan bantuan (kerja bakti), melakukan propaganda bagi masyarakat untuk migrasi dan mendirikan pembenihan untuk meningkatkan produksi pangan. Selain itu, dilakukan juga upaya reorganisasi pemberantasan penyakit yang turut melibatkan masyarakat agar

²³ Wasino, *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014, hlm. 8.

dapat mempunyai pengetahuan tentang kesehatan.²⁴

Perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Banyumas menunjukkan adanya kesenjangan. Segala pembangunan yang ada hanya ditujukan untuk kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi pemerintah. Kesenjangan ini semakin terlihat ketika kereta api di bangun di Kota Purwokerto, tidak di Kota Banyumas. Kantor-kantor dagang yang dulu bergantung pada pelayanan Sungai Serayu di Kota Banyumas memindahkan kantornya ke Kota Purwokerto. Hal ini membuat Kota Banyumas yang sebelumnya ramai menjadi sepi. Akhirnya pada 1937, pemerintah kolonial Hindia Belanda memindahkan kantor pusat pemerintahan kabupaten sekaligus karesidenan Banyumas ke Kota Purwokerto.

E. Kesimpulan

Sebelum kedatangan bangsa Belanda, Banyumas merupakan daerah yang sangat terisolir. Jalan-jalan darat

masih sangat sempit dan masih berupa jalan setapak. Sarana transportasi juga sangat terbatas yakni berupa dokar, gerobak, dan kuda. Sementara sebagian lagi merupakan transportasi sungai berupa perahu dan rakit. Ketika pemerintah Hindia Belanda mulai berkuasa, berbagai kebijakan dan proyek untuk kepentingan kolonialisme dilakukan, seperti tanam paksa yang telah mengenalkan jenis tanaman dan teknik penanaman baru. Disusul dengan kebijakan liberalisasi ekonomi melalui Undang-undang Agraria 1870 yang memicu perkembangan perkebunan dan pabrik gula, juga industri lainnya.

Perkembangan ekonomi yang terjadi sejak tahun 1890 tidak hanya memusatkan perhatiannya terhadap perluasan perkebunan dan industri, melainkan juga terhadap infrastruktur pendukungnya. Pembangunan infrastruktur seperti perbaikan dan pengembangan jaringan jalan, pengadaan teknologi transportasi, pengembangan daerah irigasi dan proyek pembangunan listrik dilakukan untuk meningkatkan mobilitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengatasi masalah distribusi karena kondisi alam Banyumas yang terisolir. Hal ini didukung dengan

²⁴ JJ. Helsdingen, "Memori Residen Banyumas, 24 Oktober 1925" *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977), hlm. CVII.

munculnya teknologi transportasi pada akhir abad ke-19, seperti term dan kereta api, sepeda, motor, mobil juga outobis.

Memasuki awal abad ke-20, perhatian pemerintah kolonial mulai diberikan terhadap kesejahteraan penduduk. Pembangunan daerah semakin giat dilakukan setelah disahkannya Undang-undang Desentralisasi 1903 yang membentuk Dewan Rakyat untuk mengelola daerahnya secara otonom. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda telah merubah tatanan hidup masyarakat Banyumas. Masyarakat mulai mengenal tatanan pemerintahan, pemikiran, dan cara hidup Barat karena terlibat dalam interaksi melalui birokrasi, ekonomi, dan pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Proses pembaratan ini memicu terjadinya perubahan sosial yang tidak terhindarkan. Muncul kelas sosial baru sebagai golongan menengah yaitu kelompok cendekiawan bumiputra.

Kelompok cendekiawan bumiputra memiliki peran yang besar dalam perkembangan daerah Banyumas lebih lanjut. Pendidikan barat yang

ditempuh oleh golongan elit lambat laun memunculkan kesadaran akan realitas sosial. Kesadaran ini semakin terasa ketika terjadi krisis global pada tahun 1930-an. Banyumas menjadi daerah yang mendapat pengaruh krisis sangat parah. Kelompok elit Banyumas berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan seperti pengadaan rumah miskin, dapur umum, kegiatan kerja bakti, dan pembangunan-pembangunan proyek besar dilakukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, perkembangan yang terjadi tidak menunjukkan adanya pemerataan. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur hanya dilakukan di daerah yang potensial. Sementara daerah lainnya kurang mendapat perhatian. Daerah yang dianggap berpotensi secara ekonomi dan menjadi sorotan pada masa kolonial adalah Purwokerto. Purwokerto berkembang menjadi kota yang ramai bahkan mengalahkan pusat pemerintahan sendiri, yaitu Kota Banyumas. Hal ini berdampak pada perpindahan pusat pemerintahan dari Kota Banyumas ke Kota Purwokerto.

Daftar Pustaka

Arsip

Kolonial Verslag 1892, Kolonial Verslag 1921.

JJ. Helsdingen, "Memori Residen Banyumas, 24 Oktober 1925" *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977.

M. Zandveld, "Memori Residen Banyumas, 4 Juli 1922", *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977.

M.J van der Pauwert, "Memori Residen Banyumas, 24 Oktober 1925" *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977.

Buku

Anastasius Daliman, *Panduan Penelitian Historis*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, 2005.

Anastasius Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Fasseur, C., *The Politics of Colonial Exploitation: Java, Dutch, and Cultivation System*, Leiden, 1975.

Handinoto, *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, terj. Sunarto, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007.

_____, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

Hugiono dan P.K. Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005.

- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Jakarta: Percetakan Balai Pustaka, 1992.
- _____, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta: Percetakan Balai Pustaka, 2009.
- Ronald Gilbert Gill, *De Indische Stad op Java en Madura: en Morphologische Stadi van Haar Ontwikkeling*, Den Haag: Publicatieburo Bouwkunde, Faculty der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, 1995.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Soegeng Wiyono dan Sunardi, *Banjoemas: Riwajatmoe Doeloe*, Purwokerto: Daya Mandiri Production, 2006.
- Soegijanto Padmo, *Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Jurusan Sejarah FIB UGM dan Program Studi Sejarah Program Pascasarjana UGM, 2004.
- Sumitro Djojohadikusumo, "Pendekatan Seorang Ekonom terhadap Perspektif Historis: Beberapa Pengamatan Acak", dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.
- Supardi, *Dasar-dasar Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Susanto Zuhdi, *Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*, Jakarta: KPG, 2002.
- Tanto Sukardi, *Tanam Paksa di Banyumas: Kajian Mengenai Sistem, Pelaksanaan dan Dampak Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wasino, *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.
- Yustina Hastrini, dkk., *Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas masa Gandasubrata 1913-1942*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2015.

Jurnal

Ir. G.S. Goemans, "Het waterkrachtwerk „Ketenger” der N.V. Algemeene Nederlandsch-Indie Electriciteit Maatschappij in de residentie Banjoemas (Java) door ir. G.S. Goemans”, *De Ingenieur In Nederlandsch-Indie*, 7e Jaargang Nummer 9, September 1940.

Prima Nurahmi Mulyasari, "Modernisasi Tata Ruang Kota Purwokerto 1900-1935", *Patrawidya*, Vol. 15, No. 4, Desember 2014.

Skripsi dan Tesis

Ageng Nur Ma'ruf, "Peranan Trem *Serajoedal Stroomtram Maatschappij* dalam Perkembangan Pengangkutan di Banyumas 1896-1899", *Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY*, 2014.

Prima Nurahmi Mulyasari, "dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Karesidenan: Purwokerto 1900-1942", *Skripsi Jurusan Sejarah FIB UGM*, 2006.

Purnawan Basundoro, "Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1840-1940", *Tesis, Pascasarjana Prodi Sejarah FIB UGM*, 1999.

Yogyakarta, 23 Januari 2017

Pembimbing

Mengetahui,
Reviewer



Miftahuddin, M.Hum
NIP. 19740302 200312 1 006



H.Y. Agus Murdyastomo, M.Hum
NIP. 19580121 198601 1 001